



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
UNIT KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ABD WARIS BESTARI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 647884

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.776.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/112.5 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
2. Tanah Seluas 371.13 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 1242 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
6. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
7. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA MAMUJU TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
8. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA MAJENE, WARISAN Rp. 70.000.000
9. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA POLEWALI MANDAR , WARISAN Rp. 100.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/78 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 6 m2/14 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 74.500.000

1. MOTOR, HONDA FIC02N28LO A/T/SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000
2. MOTOR, HONDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 143.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 47.385.506

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.040.885.506

III. HUTANG

Rp. 75.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.965.885.506

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.